

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

RAHMAWATI

rahma.abyalia@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Berau

Received: 02/01/2021	Revised: 12/03/2021	Accepted: 30/03/2021
----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan APBD Kabupaten Berau berdasarkan rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana penelitian yang berupaya menghubungkan pemecahan masalah yang sedang terjadi dengan menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data dan kemunculan hasil. Populasi dalam penelitian ini merupakan laporan realisasi APBD Kabupaten Berau tahun 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja atas laporan realisasi APBD Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rata-rata rasio kemandirian berada pada 10,96 persen pada kategori rendah; 2) Median derajat desentralisasi fiskal rata-rata 9,55 persen dengan kategori sangat kurang; 3) Rasio efektivitas rata-rata sebesar 96,06 persen menurut kategori cukup efektif; 4) Rasio kegiatan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasional dengan rata-rata 58,80 persen dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 41,17 persen; 5) Rasio pertumbuhan dapat dikatakan Pemkab Berau belum mampu mengimbangi besarnya pendapatan dan belanja, rasio pertumbuhan pendapatan rata-rata (positif) 0,45 persen dan rasio pertumbuhan belanja rata-rata (negatif) menjadi 2,74 persen.

Kata Kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, APBD.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 1 – 9

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ABSTRACT

Research conducted to determine the financial performance of the Berau District Budget based on the ratio of independence, degree of fiscal decentralization, effectiveness ratios, activity ratios and growth ratios in 2014-2018. This research is a quantitative descriptive study where research that seeks to connect solving problems that are happening using numbers, ranging from data collection, data interpretation and appearance of results. The population in this study is a report on the realization of the Berau District Budget in 2014-2018. The sample in this study is the revenue and expenditure budget data on the realization report of the Berau District Budget. The data collection technique used is documentation technique. The type of data used is secondary data sourced from the Berau District Budget Realization Report 2014-2018.

The results showed: 1) The average independence ratio was at 10.96 percent in the low category; 2) The average degree of fiscal decentralization is 9.55 percent with very poor category; 3) The average effectiveness ratio was 96.06 percent according to the fairly effective category; 4) The ratio of activities can be said that the Berau Regency Government allocates a large part of its budget for operational expenditures with an average of 58.80 percent compared to the average capital expenditure of 41.17 percent; 5) The growth ratio can be said that the Berau Regency Government has not been able to keep up with the amount of income and expenditure, the average income growth ratio (positive) is 0.45 percent and the average expenditure growth ratio (negative) is 2.74 percent.

Kata Kunci : *financial ratios, financial performance, APBD*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disinilah era otonomi daerah dimulai di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Selain itu, salah satu

perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Berau mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Berau sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Halim (2007) dalam Mutiha (2016) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

KAJIAN PUSTAKA

Soemarso (1996) Analisis Laporan Keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna atau menjelaskan arah perubahan suatu fenomena. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi (Prastowo, 2011:57). Berdasarkan pengertian sebelumnya maka analisis laporan keuangan adalah suatu proses membedah-bedah antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

1. Analisis Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi +Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1.
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (persen)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Tabel 2.
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3. Analisis Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

4. Analisis Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Operasi thp Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal thp Total Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Analisis Rasio Pertumbuhan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja th t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th t} - \text{Realisasi Belanja Th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja Th (t-1)}} \times 100\%$$

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis rasio pada laporan realisasi anggaran memperlihatkan rata-rata untuk tahun 2014 sampai 2018 rasio kemandirian sebesar 10,96 persen, rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 9,55 persen, rasio efektivitas sebesar 96,06 persen, rasio aktivitas pada belanja operasi sebesar 58,80 persen sedangkan pada belanja modal sebesar 41,17 persen dan rasio pertumbuhan pendapatan memperoleh rata-rata pertumbuhan (positif) 0,45 persen untuk rasio pertumbuhan belanja memperoleh rata-rata pertumbuhan (negatif) 2,74 persen.

Table 1.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

Tahun	Rasio	Rasio Derajat	Rasio	Rasio Aktivitas (%)		Rasio Pertumbuhan (%)	
	Kemandirian (%)	Desentralisasi Fiskal (%)	Efektivitas (%)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Pendapatan	Belanja
2014	11,34	10,19	128,85	52,22	47,66	24,13	31,46
2015	9,90	8,89	83,80	48,99	50,99	-3,05	16,66
2016	8,53	7,60	74,33	60,94	39,15	-10,75	-20,97
2017	14,41	12,03	89,15	67,06	32,94	-4,21	-21,85
2018	10,60	9,07	104,20	64,91	35,09	24,81	15,20
Rata-rata	10,96	9,55	96,06	58,80	41,17	0,45	-2,74

KESIMPULAN

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan juga kecilnya jumlah belanja daerah, bahkan belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Hal ini baik bagi kinerja pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Berau mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga pemerintah daerah mengalami surplus atau keuntungan. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Berau bergantung dengan pemerintah pusat. Untuk rasio derajat desentralisasi fiskal yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Berau belum mampu memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan dengan menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

sendiri. Rasio efektivitas yang tergolong kategori cukup efektif terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Berau sudah cukup baik dalam memobilisasi atau merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk rasio aktivitas belanja modal atau pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat masih tergolong rendah hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Berau lebih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin. Dan untuk rasio pertumbuhan pendapatan yang memperoleh hasil positif terjadi dikarenakan adanya penambahan jumlah pendapatan yang diterima namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja yang memperoleh hasil negatif dikarenakan berkurangnya jumlah belanja yang dikeluarkan.

REFERENSI

- Al-Gazali.2019. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013-2017. Skripsi. Sarjana. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb.
- Assidiqi, Bahrun.2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012. Skripsi. *Sarjana*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Banga, Wempy.2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto.2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Salemba Empat, Jakarta.
- Faud, Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hakim, Mochamad Faishal.2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016.Skripsi.*Sarjana*.Universitas Islam Indonesia.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, Andri.2014. Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan.Skripsi.*Sarjana*.Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Kabupaten Berau Dalam Angka <https://beraukab.bps.go.id/publication.html> Diakses pada 25 Februari 2020 08.02
- Lazyra.2016. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- Medan. Skripsi. *Sarjana*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
- Mutiha, Arthaingan H. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. Jurnal Vokasi Indonesia. Vol 4, No 2. (2016).
<http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/101> Diakses pada 5 Maret 2020 19.31
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratiwi, Niken Marita. 2017. *Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. *Sarjana*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prastowo, Dwi.2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Putri, Riri Septyningrum.2018. *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. *Sarjana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, LKMD, Yogyakarta.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Statistik Daerah Kabupaten Berau 2019 <https://beraukab.bps.go.id/publication.html> Diakses pada 3 Januari 2020 10.05
- Suartini, Ni Made. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

DOI:xxxxx

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

<http://dexsuar.blogspot.com/2013/09/analisis-laporan-keuangan.htm?m=1>, diakses tanggal 15 Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.